

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Chazawi Adami, Ferdian Ardi, *“Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik”*, Bayu Media, Malang, 2011.
- Dianarini Ari, *“Kegagalan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di BUMN (PERSERO)”*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013
- Dewi, Baiq Yustitia, *“Pengadaan Barang oleh Pemerintah melalui E – Procurement”*, tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- Roosdiyana Fatma, *“Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik”*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Roosdiyana, Fenty Kamila, *“Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surabaya”*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Suparni Niniek, *Masalah Cyberspace (Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya)*. Fortun Mandiri Karya, Jakarta, 2001
- Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Simamora, Y. Sogar, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, kantor “WINS & Partners” dan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, 2012.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Burgerlijk Wetboek (BW), terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Stb. 1847 Nomor 23.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 atas perubahan ke 2 Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala nomor 6 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.

Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E – Tendering.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pusat Studi Hukum Teknologi Informasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, November 2001.

United Nations (UNO), UNCITRAL *Model Law On Electronic Commerce*, 1996

WEBSITE

<http://mypengadaan.blogspot.com/2010/01/prinsip-dasar-pengadaan-barang-jasa.html>.

<http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.com/2012/07/pengadaan-jasa-konsultasi.html>.

<http://timlpse.lomboktengahkab.go.id/?p=4508>.

